

KRIMINALITAS DI PALEMBANG: KERUSUHAN DAN PENJARAHAN DI KOTA PALEMBANG PADA BULAN MEI 1998

Nanda Julian

*Mahasiswa Program Studi Pascasarjana Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
email: nandajulian18@gmail.com*

Abstrak: Setelah berkuasa di Indonesia selama lebih dari 30 tahun, rezim Soeharto akhirnya jatuh oleh gerakan besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri. Reformasi, yang dibawa oleh mahasiswa dan orang-orang yang peduli tentang bangsa ini. Namun, tidak semua gerakan yang diselenggarakan oleh orang-orang memiliki karakter politik atau terlihat patriotik. Untuk beberapa kelompok kelas bawah, proses jatuh Suharto memberikan beberapa kesempatan ekonomi antara krisis pada 1998. Hampir semua tempat di Indonesia, khususnya di kota-kota besar terdapat tindakan kriminalitas. Sebagai contoh: menjarah, penghancuran bangunan (terutama Properti yang berbau Tiong hoa-an), dan jenis kriminalitas lainnya. Pola pergerakan kriminalitas ini mungkin mirip di setiap kota, tapi ada harus sesuatu yang unik di setiap tempat. Dengan menggunakan metode sejarah sebagai metode penelitian, Artikel ini akan menunjukkan ilustrasi dan penjelasan tentang proses yang sama kriminalitas itu tetapi terbatas di Palembang pada Mei 1998.

Kata Kunci: Reformasi, Orde Baru, Kriminalitas, Menjarah, Pengerusakan

PENDAHULUAN

Peristiwa Mei 1998 di Indonesia merupakan sebuah peristiwa besar yang meruntuhkan legitimasi politik penguasa (Suharto) yang telah berhegemoni bertahun-tahun lamanya di negara ini. Suharto yang telah menjabat lebih dari 30 tahun sebagai pucuk pimpinan tertinggi negeri ini harus menerima kenyataan pahit dilengserkan oleh rakyat, yang selama ini secara sukses dia bungkam dan batasi tuntutan, terutama tuntutan dalam bidang politik. Atas nama stabilitas nasional, Suharto menjaga hegemoni kekuasaannya dari tangan-tangan oposisi baik itu yang datang dari bidang politik sendiri, ekonomi, bahkan kalangan intelektual agama lewat pengerdilan organisasi-organisasi agama. Namun sebenarnya, kebanyakan rakyat Indonesia tidak memungkir bahwa pada masa Suharto rakyat dimanjakan oleh berbagai peningkatan dari taraf ekonomi, baik itu dari segi infrastruktur maupun peningkatan hal bidang ekonomi lainnya. Singkatnya

walaupun otoriter Suharto memberikan angin segar berupa “kemakmuran” bagi rakyat Indonesia, setidaknya pasca pemerintahan Soekarno hingga kejatuhan Soeharto bulan Mei 1998.

Berbicara mengenai pemerintahan yang dibangun oleh Suharto, dia juga dikelilingi oleh mereka-mereka yang loyal pada diri Suharto sendiri. Mereka itu mulai dari birokrat, militer, hingga para pegawai negeri yang sebenarnya sudah terkooptasi pada simbol partai yang dikendalikan Soeharto. Hematnya, pemerintahan ini korup, penuh dengan kolusi, serta marak dengan pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan keluarga atau nepotisme. Korupsi yang merajalela membuat jurang pemisah yang sangat tajam antara yang kaya dan miskin. Banyak sekali pundi-pundi rupiah yang didapatkan oleh para elite yang memihak Suharto, entah itu lewat jalan korupsi proyek, suap, atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan mereka. Disamping itu rezim ini

terkenal dengan praktek nepotismenya, orang tidak perlu susah-payah untuk menjabat atau mendapatkan suatu pekerjaan jika punya hubungan keluarga dengan penguasa atau pemimpinnya. Mereka yang mendapatkan porsi itu sama sekali tanpa *fit and proper test*, tanpa diketahui sama sekali kemampuannya.

Praktek semacam itu subur selama Suharto memimpin, hanya saja tidak ada sesuatu yang abadi. Rakyat yang tadinya diam, akhirnya beranjak juga dan melakukan protes. Puncaknya ketika ekonomi Indonesia hancur kemudian disusul oleh protes keras dari mahasiswa yang turun ke jalan menuntut perubahan. Tidak cuma mahasiswa yang berlatar belakang orang-orang yang intelektual, namun juga kalangan rakyat biasa. Apakah rakyat itu mengikuti demonstrasi? tidak diketahui dengan pasti apakah ada unsur masyarakat selain mahasiswa yang melakukan protes atau demonstrasi, hanya saja pengrusakan dan penjarahan marak dilakukan oleh kalangan masyarakat. Pengrusakan ini dianggap sebagai bentuk aksi kolektif yang berujung pada kriminalitas, karena dalam realitanya para oknum rakyat yang melakukannya menggunakan cara-cara kekerasan baik itu membakar, melukai orang (biasanya etnis-etnis tertentu) hingga melakukan penjarahan. Konsep kerusuhan dan kriminalitas juga dilihat dari model dan aksi kolektif yang dijabarkan oleh Charles Tilly (1978), dimana aspek kepentingan yang berujung pada persoalan ekonomi dan politik menjadi sebab utama gerakan ini. Disamping itu menurut Tilly, intensitas orang-orang melakukan tindakan aksi kolektif ini juga disebabkan salah satunya oleh terjadinya krisis yang dialami oleh negara tersebut.

Penjarahan dan Pengrusakan mungkin memiliki porsi yang lebih banyak dibanding bentuk kriminalitas lain pada bulan Mei 1998 dan kedua macam kriminalitas ini dilakukan oleh dua subjek yaitu mahasiswa dan masyarakat, dengan porsi lebih besar berada pada aksi kolektif masyarakat. Peristiwa ini

terjadi di ibukota dan meluas hampir diseluruh kota-kota besar di Indonesia, termasuk Palembang. Pola kriminalitas yang terjadi mungkin sama dengan yang terjadi di Jakarta atau kota lain di Indonesia, hanya saja yang membatasi mungkin dari segi lingkup lokalitas saja. Kriminalitas di Palembang pada tahun 1998 akan menjadi bahasan utama dalam tulisan ini. Sumber primer berupa Koran se-zaman akan menjadi sumber utama pula pada penulisannya, dengan beberapa sumber sekunder yang menunjang.

PEMBAHASAN

Kehancuran Ekonomi, Runtuhnya Diktator, dan Dampaknya Bagi Daerah.

Kehancuran ekonomi bisa jadi merupakan pemicu awal peristiwa Mei 1998, disamping sudah hilangnya kesabaran rakyat dengan pemerintahan orde baru. Jika saja ekonomi Indonesia tidak terpuruk, dan Suharto berumur panjang mungkin dia akan tetap jadi presiden hingga sekarang. Namun sejarah bukanlah sebuah pengandaian, namun pembeberan fakta. Awal tahun 1990-an bisa dikatakan sebagai era keemasan perekonomian Indonesia, bahkan diprediksi oleh banyak pengamat ekonomi Indonesia akan menjadi "macan Asia" yang baru. Tahun 1993-1994 pemerintah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mendorong investasi asing, yang berakibat pertumbuhan ekonomi nasional naik pesat hingga lebih dari 8% pertahun.

Perubahan ekonomi yang bisa dikatakan baik ini memancing pula apa yang disebut dengan perubahan sosial. Pada saat yang bersamaan pula di Indonesia mulai menjamur berbagai pusat hiburan dan perbelanjaan, tempat orang-orang muda menghabiskan waktu terutama di akhir pekan. Namun kejayaan tersebut tak berlangsung lama, tahun 1997 ketika Asia Tenggara dihadapkan pada krisis ekonomi yang besar. Krisis ini berdampak buruk pada perekonomian nasional, yang ternyata

dibangun dari utang luar negeri yang besar pula. Indonesia setidaknya telah 2 kali mengalami krisis sebelum tahun 1998, namun yang terjadi pada masa Suharto ini yang paling besar. Puncak dari kehancuran ekonomi Indonesia ini adalah ketika Rupiah menyentuh angka Rp. 17.000,00 per Dollar pada bulan Januari 1998, padahal Rupiah selalu berada dikisaran Rp. 2.500,00 per Dollar beberapa bulan sebelumnya. Bersamaan itu pula bursa saham Indonesia turut hancur yang kemudian memicu hancurnya banyak perusahaan, kemudian berdampak pada banyaknya pekerja yang di-PHK, serta banyaknya bank yang ditutup dan menyebabkan banyak uang nasabah yang hilang. Selain itu konflik dengan berbagai lembaga bantuan dunia membuat kondisi perekonomian Indonesia semakin parah.

Sebelum tahun 1998, dilihat kembali Pemilu di Indonesia. Walaupun dampak buruknya ekonomi sudah mulai terasa namun Golkar tetap jadi pemenang dengan perolehan suara yang cukup signifikan yaitu 75% dari 84,2 juta pemilih, ini merupakan prestasi terbesar Golkar sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia. Kemudian MPR kembali memilih Suharto sebagai Presiden dengan didampingi oleh B.J. Habibie sebagai wakilnya. Namun kemudian, banyak juga yang mulai tidak mendukung atau terang-terangan menolak Suharto, salah satunya datang dari golongan mahasiswa. Pertikaian antara mahasiswa dan pemerintah akhirnya memuncak setelah terjadi penembakan yang menewaskan beberapa mahasiswa Trisakti tanggal 12 Mei 1998. Lewat proses yang tidak terlalu lama (setelah didudukinya gedung DPR), akhirnya tanggal 21 Mei 1998 Suharto resmi meletakkan jabatannya sebagai Presiden akibat tuntutan massa yang tidak sabar menginginkan perubahan.

Ada pola yang menarik ketika dampak negatif krisis terjadi diseluruh Indonesia, sedangkan dampak kemakmuran ekonomi pra-krisis hanya dinikmati oleh beberapa kota

besar khususnya di pulau Jawa. Ketika krisis menyebar tak lain dikarenakan harga-harga sembako yang dibutuhkan rakyat kecil juga ikut naik, sehingga melemahkan daya beli mereka padahal mereka sendiri hidup kekurangan. Banyak rumah tangga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi anggota keluarganya. Sehingga selama krisis tingkat gizi buruk di Indonesia meningkat sebanyak 15 %. Selain itu ketika masa krisis juga disinyalir banyak anak Indonesia yang putus sekolah. Efeknya kemudian maraknya kriminalitas terkait krisis 1998 ini khususnya yang terjadi pada bulan Mei, bertepatan dengan peristiwa politik yang merubah tatanan struktur pemerintahan Indonesia. Di Medan Kerusuhan terjadi tanggal 5 Mei 1998 berawal dari bentrokan aparat kepolisian melawan mahasiswa, peristiwa ini meluas kesekitar kota diluar Medan lainnya. Di Lampung kerusuhan bermula dari mogoknya sopir angkutan desa Banjarjaya yang meluas hingga ke kota Tanjung Karang. Sedangkan di Solo tanggal 14 Mei 1998 terjadi pengrusakan dan pembakaran berbagai toko dan bangunan. Peristiwa serupa juga terjadi di Palembang dimana konsentrasi kriminalitas terjadi di pasar-pasar baik itu tradisional maupun moderen yang pusatnya terletak di sekitar Jembatan Ampera dan jalan Jend. Sudirman.

Peristiwa Mei 1998 di Palembang: Kriminalitas atau Gerakan Intelektual ?

Beranjak dari pertanyaan diatas jika peristiwa Mei 1998 hanya ditujukan untuk melengserkan Suharto, mengapa sampai terjadi pembakaran, pengrusakan, penjarahan, bahkan pemerkosaan hingga pembunuhan. Latar belakang ekonomi pada pengrusakan dan penjarahan mungkin menjadi sudut pandang yang tepat untuk melihat permasalahan ini. Krisis ekonomi membuat rakyat yang miskin bertambah miskin, sedangkan yang kaya tidak terlalu peduli dengan hal tersebut, sehingga pada akhirnya rakyat berontak, bukan hanya pada penguasa

(Suharto), namun juga pada sekelompok elit yang punya banyak kapital dan menguasai perekonomian. Daerah 16 Ilir merupakan salah satu daerah tersibuk yang ada di Palembang. Disana terdapat pasar tradisional, toko-toko elektronik, gudang-gudang besar logistik milik pengusaha cina serta Bank-bank swasta. Memang ketika kita melihat para pedagang di pasar tradisionalnya maka yang terlihat adalah wajah-wajah pedagang kaki 5, atau wajah pedagang pribumi lain yang setingkat diatas pedagang kaki 5. Sedangkan mereka yang memiliki toko-toko elektronik dan gudang-gudang logistik yang besar adalah mereka golongan etnis tiong-hoa.

Menarik memang jika melihat para korban yang rata-rata adalah berasal dari etnis tiong-hoa. Rata-rata toko yang dihancurkan dan dijarah oleh massa adalah kepunyaan etnis tiong-hoa, belum lagi dihitung dengan korban jiwa seperti tindak kriminal lain seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Jika ditarik lebih jauh tentang masalah ini, etnis tiong-hoa kerap menjadi sasaran atau bahkan korban dari huru-hara pergantian hegemoni politik di Indonesia. Tahun 1942 ketika terjadi pergantian kekuasaan dari Belanda ke tangan Jepang, pihak tiong-hoa khususnya diwilayah Jakarta termasuk Karawang menjadi korban penjarahan massa. Gerombolan massa itu mengambil keuntungan dari kisruh politik tersebut. Hal serupa kemudian terjadi pada tahun 1945 pasca Indonesia merdeka, dimana terjadi kerusuhan diwilayah Jakarta timur yang menewaskan banyak sekali orang-orang tiong-hoa. Peristiwa seperti ini turut pula terjadi di Palembang pada masa revolusi. Sikap orang-orang cina Palembang yang terkesan tidak terlalu peduli dengan perubahan politik kala itu, membuat geram beberapa kelompok organisasi militer di Palembang. Selama perang revolusi di Palembang, sekitar 250 orang warga etnis tiong-hoa tewas dan 600 orang hilang, dan diperkirakan hal ini bukan terjadi akibat perang melawan Belanda namun karena kekerasan dan kriminalitas oleh

beberapa organisasi semi-militer dan golongan pemuda pro republik kala itu. Hal ini kemudian mengakibatkan terjadinya eksodus para warga dan pedagang tiong-hoa Palembang ke Singapura.

Gerakan intelektual yang terjadi di Palembang memang dimotori oleh para mahasiswa, hanya saja selama aksi itu damai. Namun ketika aksi demonstrasi berubah menjadi anarkis dengan melakukan pengrusakan, bahkan penjarahan seperti itu bukan lagi dinamakan aksi intelektualitas. Memang yang umumnya melakukan penjarahan dan pengrusakan adalah kalangan rakyat, namun ini terjadi akibat pengaruh mahasiswa juga yang terlibat betrok dan kerusuhan. Tanggal 7 mei 1998 ada isu bahwa setelah *longmarch* para mahasiswa salah satu Universitas swasta di Palembang akan mengadakan kerusuhan disekitar Jalan Sudirman dan A. Rivai, tempat berbagai macam toko besar yang ada di Palembang. Namun seperti itu hanya isu saja, karena setelah dijaga aparat pada hari itu tak terjadi hal-hal seperti yang dikhawatirkan.

Namun ketika hari-hari berikutnya kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat dan beberapa mahasiswa tidak bisa dielakkan lagi. Sebelum melakukan pengrusakan para mahasiswa ini awalnya bergerak menuju kantor DPRD Provinsi untuk melakukan dengar-pendapat. Namun karena tidak puas dengan jawaban para anggota dewan, massa mahasiswa akhirnya bergerak menuju jalan Jend. Sudirman, dimana disana banyak sekali terdapat pertokoan yang menjadi objek pelemparan batu oleh massa yang tidak puas. Diperkirakan sekitar 45 toko mengalami kerusakan seperti kaca yang pecah atau pengrusakan bagian lainnya, namun belum terdapat penjarahan pada pengrusakan ini.

Aksi penjarahan benar-benar terjadi yaitu keesokan harinya tanggal 14 Mei 1998 di kota Palembang. Mengetahui toko-toko yang sudah rusak pintu dan kacanya, maka para penjarah dengan mudah bisa mengambil

barang-barang dan isi toko. Mereka melakukan penjarahan di beberapa titik pertokoan di kota Palembang seperti daerah pasar 16 ilir, pasar tengkuruk, jalan Jend. Sudirman, Pulau mas, dan beberapa tempat lainnya. Disini yang melakukan penjarahan adalah para warga, dimana data yang dihimpun oleh Surat kabar Sriwijaya Pos (15 mei 1998) terdapat sekitar 300 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian. Para penjarah rupanya bukan hanya terdiri dari laki-laki dewasa, namun juga ada beberapa wanita dan ironisnya juga dilakukan oleh puluhan anak-anak. Mereka menjarah barang-barang mulai dari barang-barang elektronik, sembako, hingga pakaian.

Aksi penjarahan ini kemudian berlanjut lagi keesokan harinya, dan tempat yang dituju adalah pasar-pasar dengan skala yang lebih kecil atau pasar tradisional. Pasar-pasar tersebut seperti pasar 7 ulu, pasar 10 ulu, pasar plaju, dan pasar lelabang. Para penjarah tidak hanya menjarah toko-toko besar, namun juga toko-toko yang kepemilikan dari orang pribumi yang kecil juga turut dijarah. Disini mereka cenderung menjarah barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, terigu, minyak sayur, dan gula. Selain itu massa yang berada disekitar pertokoan yang besar yang telah dijarah sehari sebelumnya juga masih ramai menjarah sisa-sisa barang-barang yang ada, khususnya barang-barang elektronik.

Selain pertokoan, ada beberapa individu yang juga menjadi korban penjarahan di kota Palembang. Amin Mulia, seorang konglomerat keturunan tiong-hoa dari Palembang merupakan seorang pengusaha sukses juga ikut menjadi korban. Pada tanggal 15 Mei 1998, sekelompok orang masuk dengan paksa kedalam rumahnya dan menjarah serta menghancurkan beberapa perabot rumah tangga disana. Selain itu, beberapa penjarah juga diketahui meminta uang kepada pemilik rumah. Amin Mulia yang tidak bisa bertindak apapun, hanya bisa

pasrah melihat perlakuan para penjarah, dia pun mengaku merugi puluhan juta rupiah.

Aksi penjarahan di Palembang hanya terjadi 2 hari yaitu tanggal 14-15 mei 1998, namun dampak ekonomi yang dirasakan para korban sangatlah besar. Ada sekitar ratusan pertokoan dipalembang yang rusak, baik itu rusak ringan, maupun berat seperti terbakar. Catatan signifikan dari polda Sumsel mencatat bahwa ada sekitar 179 toko dan 109 rumah yang rusak, kemudian ada 11 motor dan 15 mobil terbakar, serta total 195 kerusakan fasilitas umum.

Tanggal 17 mei 1998, keadaan kota Palembang sebenarnya telah kondusif dimana aksi penjarahan dan kerusakan sudah tidak terlihat lagi. Disamping itu lalu-lintas juga kembali ramai dibuka, dimana beberapa rute angkutan umum telah beroperasi. Pasar-pasar tradisional juga telah banyak dibuka, hanya saja harga-harganya sudah tak terkendali pasca krisis dan keterbatasan stok akibat dijarah. Khususnya untuk harga sayuran seperti cabai yang menyentuh angka belasan ribu per-kilogramnya. Hal ini mungkin bisa dimaklumi karena pedagang yang berjualan hanya sedikit, sehingga mereka bisa mempermainkan harga.

Pasar 16 ilir yang merupakan pasar tradisional di Palembang, mulai pulih tanggal 23 mei 1998 dimana telah ada sebagian besar pedagang yang menjual dagangannya di pasar tersebut. Pengunjung pasar juga telah ramai kembali. Para pedagang cukup repot meladeni para pembeli yang sangat banyak membutuhkan barang kebutuhan pokok, karena langkanya barang-barang tersebut ketika kerusakan. Sebenarnya para pedagang kecil juga mengalami kelangkaan barang dagangan mereka, namun hal ini cepat saja diantisipasi oleh para pedagang besar yang telah menyuplai barang-barang tersebut kepada pedagang kecil.

Ada beberapa subjek yang harus dibedakan dalam peristiwa mei 1998 di Palembang ini. *Pertama*, adalah golongan

mahasiswa yang pada awalnya memotori gerakan yang sifatnya intelektual. Mereka melakukan protes dan dengar pendapat kepada DPRD Provinsi Sumsel untuk masalah Reformasi ini. Mahasiswa lewat para perwakilannya menolak jika mereka juga dikategorikan sebagai kriminal atau yang juga melakukan aksi penjarahan dan pencurian di berbagai Toko. Mereka mengklaim telah menarik diri dari jalan ketika penjarahan berlangsung. Mahasiswa juga mengatakan sebenarnya ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dalam barisan mereka yang menyerukan kata-kata untuk bertindak anarkis, sehingga para mahasiswa yang terpancing emosinya akhirnya melakukan pengrusakan.

Sedangkan yang *kedua*, mereka yang melakukan penjarahan adalah mereka yang dikategorikan sebagai masyarakat. Sesuai dengan laporan kepolisian ketika terjadinya penangkapan oleh polisi, kebanyakan mereka adalah warga, bahkan warga disekitar pertokoan tersebut. Disamping itu tindakan kriminal ini bukan hanya di jalankan oleh orang dewasa namun juga oleh anak-anak. Gerakan yang dilakukan oleh masyarakat ini cenderung merupakan gerakan yang oportunistik. Hal ini menandakan adanya dua subjek yang berbeda dari peristiwa Mei yang terjadi di kota Palembang. Masing-masing memiliki porsinya tersendiri dalam peranannya. Mahasiswa selain motor dari gerakan intelektual, namun mereka pula yang mengawali kerusuhan. Hal ini kemudian diikuti oleh banyak penduduk keesokan harinya dengan melakukan penjarahan.

PENUTUP

Peristiwa Mei 1998 ini pada dasarnya memang merupakan peristiwa nasional, namun juga terjadi diberbagai daerah termasuk di Palembang. Persoalan ekonomi yang memburuk disertai dengan keadaan politik yang tak menentu menjadi sebab utama mengapa hal ini berlangsung. Peristiwa yang

pada awalnya hanya terjadi di Jakarta, kemudian menyebar bahkan hingga ke Palembang. Ciri kelokalan ini bukan hanya masalah skop spasial namun juga pola kriminalitas yang terjadi. Subjeknya pun bukan cuma mahasiswa yang merupakan golongan intelektual, namun juga masyarakat yang kebanyakan merupakan orang awam. Mereka seakan berbagi peran dalam peristiwa ini di Palembang.

Haruslah dipahami bahwa ketika peristiwa ini beranjak dari aksi intelektual dan berakhir pada aksi anarkis juga tidak hanya dimotori oleh mahasiswa. Masyarakat juga punya peran yang signifikan pada bentuk kriminalitas lain yang terjadi selama peristiwa Mei 1998 di Palembang. Aksi yang dilakukan mahasiswa terbatas pada bentrokan dengan aparat dan pelemparan batu yang imbasnya terkena toko-toko disekitar tempat bentrokan. Sedangkan masyarakat mengikuti dengan bentuk kriminalitas lain berupa penjarahan. Penjarahan pun merata hampir disemua titik dan sudut kota. Baik itu pasar-pasar dan pertokoan moderen, (seperti supermarket dan pertokoan elektronik) serta pasar-pasar kecil yang sifatnya tradisional juga tak luput dari sasaran para penjarah. Mulai dari barang-barang mahal hingga terigu pun merekajarah. Pelakunya juga tak tanggung-tanggung, puluhan anak kecil juga terlibat dalam aksi ini.

Mahasiswa mengklaim aksi mereka terpisah dengan aksi penduduk. Tetapi tetap saja yang dilakukan oleh kedua kelompok ini adalah merupakan aksi kriminal. Peristiwa ini satu dari sekian banyak aksi Kriminal di Indonesia ketika bulan Mei 1998, kerugiannya pun sangatlah besar, kerugiannya pun tak tanggung-tanggung mencapai miliaran rupiah. Kita mesti belajar bahwa penyelesaian buruk hanya akan memperburuk masalah karena itu pentingnya menjaga perdamaian dan mempersempit kemungkinan terjadinya konflik yang mungkin akibatnya bisa berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar

- Sriwijaya Pos, Tanggal 8 Mei 1998.
Sriwijaya Pos, Tanggal 16 Mei 1998.
Sriwijaya Pos, Tanggal 19 Mei 1998.
Sriwijaya Pos, Tanggal 25 Mei 1998.
Sumatera Ekspres, Tanggal 14 Mei 1998.
Sumatera Ekspres, Tanggal 15 Mei 1998.
Sumatera Ekspres, Tanggal 16 Mei 1998.
Sumatera Ekspres, Tanggal 17 Mei 1998.
Sumatera Ekspres, Tanggal 18 Mei 1998.

Buku-buku

- Djamal, Murni I dkk, 2003, *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Jakarta: INIS.
- Cribb, Robert. 2010. *Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949*. Jakarta: Masup Jakarta.
- Effendi, Tadjoeidin Noer. 2000. *Pembangunan, Krisis, dan Arah Reformasi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Ricklefs M.C.. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Sedyawati, Edi dan Susanto Zuhdi. 2001. *Arung Samudera: Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lopian*. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. Amerika Serikat: Addison Wesley Publishing Company.
- Vickers, Adrian. 2005. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Insan Madani.

Zon, Fadli .2004. *Politik Huru-hara Mei 1998*, Jakarta: Institute For Policy Studies